

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak kedua yang dilaksanakan di Indonesia. Berbeda dengan Pemilu 2019, Pemilu 2024 yang akan datang merupakan pemilu serentak terbesar yang pernah digelar di Indonesia. Pemilu 2024 menggabungkan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif hingga Pemilihan Kepala Daerah dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, Pemilu 2024 menjadi tantangan bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu di Pemilu 2024 yang akan datang.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya memiliki cita-cita yang besar dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Terlaksananya pemilu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan atau partisipasi politik masyarakatnya. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam memutuskan keputusan politik dari adanya keputusan politik yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah serta berkaitan dengan kehidupan warga negara (Utami, 2020). Salah satu keputusan politik adalah penyelenggaraan pemilu. Terciptanya pemilu yang berkualitas ditentukan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi ketika hari pencoblosan.

Adanya permasalahan yang dialami pada saat pemilu serentak 2019 ini menjadi bahan evaluasi untuk pemilu serentak 2024 ini. Adapun permasalahan yang dialami pada pemilu serentak di tahun 2019 ini yaitu Karena jumlah surat suara yang sangat besar, yang menghasilkan jumlah calon yang harus dipilih, membuat pemilih bingung. Selain masalah calon pesertanya, kompleksitas dan kerumitan proses pemilu juga menjadi masalah. khususnya untuk TPS yang dilakukan oleh KPPS selama penghitungan surat suara. Akibatnya, sejumlah besar masalah yang muncul sebagai akibat dari Pemilu Serentak 2019 tidak hanya berkaitan dengan sistem pemilu, tetapi juga terkait dengan pengaturan waktu yang tidak

manusiawi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara dari TPS oleh KPPS. (Fuadi, 2021)

Pemilu serentak memiliki kelemahan komunikasi antar pemangku kepentingan, misalnya. Karena banyaknya dan keanekaragaman peserta pemilu, termasuk calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, serta calon dewan perwakilan pusat dan daerah dan dewan perwakilan daerah. KPU, sebagai pelaksana, dan BAWASLU, yang melakukan pengawasan, harus sangat hati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Melihat banyaknya kerumitan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 ini menjadikan motivasi KPU untuk menciptakan pelayanan digital untuk memudahkan pihak – pihak yang bersangkutan sebagai penyelenggara pemilu ini lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Terlebih lagi di era sekarang ini sudah banyak inovasi – inovasi yang canggih dengan memanfaatkan teknologi. (Indra et al., 2022)

Dalam era digital yang semakin maju, penerapan teknologi dan informasi dan komunikasi telah menjadi suatu keharusan bagi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk implementasi teknologi ini adalah melalui penerapan e-government. Adanya penerapan e-government ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan elektabilitas, dan transparansi. E-government merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan secara elektronik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Melalui e-government, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan publik seperti pengajuan dokumen, pembayaran pajak, pengaduan masyarakat, informasi publik, dan sebagainya melalui platform online. (Auliyaa et al., 2021)

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan konsep e-government atau pemerintahan elektronik sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, adalah salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan gagasan e-government. Dalam era digital saat ini, penerapan e-government di KPU Pentingnya menjamin proses pemilihan umum yang efektif, transparan, dan akuntabel telah meningkat. KPU dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta mempercepat proses penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan.

Dalam penerapan e-government dalam KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki peran yang penting dalam implementasi e-government di Indonesia. Adapun peran dari penerapan e-government itu sendiri yaitu KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara transparan, efisien, dan dapat dipercaya. Dengan mengimplementasikan teknologi e-government, KPU Kabupaten Bogor bisa untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait dengan proses pemilihan umum, termasuk daftar pemilih, lokasi pemungutan suara, dan hasil penghitungan suara secara real-time. Ini membantu meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi, sekaligus meminimalkan potensi kecurangan. Melalui implementasi e-government ini bisa diharapkan untuk menambah keterbukaan informasi yang merupakan bagian dari badan pemerintahan yang transparansi atau instansi penyelenggara kepada masyarakat.(Nurhakim, 2014)

Dalam konteks Pemilu 2024, e-government juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan menggunakan platform online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang calon, partai politik, dan metode pemungutan suara. Lebih dari itu, e-government dapat memfasilitasi debat publik atau forum online antara calon dan pemilih, yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan memberikan pemilih pemahaman yang lebih baik tentang pilihan mereka.

Pemilihan umum merupakan kegiatan yang sangat penting yang dilaksanakannya pada setiap 5 tahun sekali yang dasarnya kegiatan Pemilu ini melibatkan banyak pihak dan juga salah satu bentuk demokrasi. Di era

sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, sudah tidak asing setiap birokrasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu secara efektif, efisien, dan adil. Dalam era digital, mereka sangat penting dalam memasukkan teknologi komunikasi dan informasi ke dalam proses pemilu (Pusparini et al., 2022).

Penggunaan teknologi elektronik dalam berbagai tahapan pemilu, termasuk pendataan pemilih, penetapan calon, pencoblosan, dan penghitungan suara, adalah salah satu contoh penerapan E-government. Adanya inovasi baru ini memunculkan inovasi-inovasi baru yang lain muncul. Seperti e-voting, e-forum, e-petisi, e-partisipasi, dan sebagainya. Terobosan baru yang muncul bisa menjadi salah satu pemicu untuk masyarakat berpartisipasi dalam politik, sehingga adanya peningkatan masyarakat dan juga transparansi instansi pemerintah kepada masyarakat. Situs-situs yang disediakan baik itu dari pihak KPU ataupun dari Partai politik menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dari jarak jauh. (Meier, 2012)

Di Indonesia sudah mulai maju dalam penerapan e-government, seperti pada pelayanan publik yang sudah memiliki berbagai aplikasi. Seperti pembuatan SIM, Pembayaran pajak, pembuatan paspor dan lain sebagainya. Adanya aplikasi ini memudahkan masyarakat. Berbagai aspek kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Mulai dari kehidupan pribadi hingga kehidupan nasional. Begitu juga dengan menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi di negara tersebut. (Rinaldi & Yuardani, 2015).

Dilansir dari laman Kominfo RI menyebutkan bahwa menurut hasil survey PBB, Indonesia mengalami peningkatan dalam pelaksanaan e-government menjadi peringkat ke 88 di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat 107 dan 116 di tahun 2016 dan Indonesia menduduki peringkat ke 35 pada e-participation index tahun 2020. (Website Kementerian Komunikasi Dan Informatika, n.d.). Dilihat dari hasil survey yang telah didapat, bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah

mulai meningkatkan kualitas e-government, hal ini juga bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah cukup berhasil dalam penerapan e-government.

Diharapkan survei ini akan berfungsi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas e-government di Indonesia. Selain itu, itu juga dapat berfungsi sebagai alat bantu pembangunan untuk membantu negara-negara anggota PBB mengidentifikasi kekuatan dan tantangan mereka masing-masing dalam upaya mempercepat penerapan kebijakan dan rencana untuk membangun sistem pemerintahan elektronik. Hal ini mencakup permasalahan yang terkait dengan implementasi e-government, seperti kurangnya nomor identitas warga negara yang valid, budaya birokrasi dan politik, kesenjangan digital, partisipasi, teknologi, dan masalah organisasi (Website Kementerian Komunikasi Dan Informatika, n.d.).

Sebagai lembaga pemerintah KPU Kabupaten Bogor sudah mulai menerapkan e-government untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan juga memudahkan untuk melakukan pelayanan publik. Media elektronik yang terlibat dalam proses demokrasi memungkinkan debat publik, diskusi publik, kritik, dan analisis keputusan publik. KPU melakukan transformasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan keputusan publik. Adanya peran KPU dalam pengimplementasian e-government menjadi salah satu bentuk untuk meningkatkan partisipasi dan juga transparansi dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Adanya tuntutan dari pemerintah dan juga perkembangan zaman yang serba digital pada saat ini, untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan public, KPU melakukan tranformasi. Sistem pemerintahan negara telah banyak diubah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Saat ini, era digital yang tengah sedang berlangsung telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk cara demokrasi berfungsi, seperti mengadakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan pemilihan umum di

Indonesia tidak dapat mengabaikan perubahan besar yang dibawa oleh era digital.

Di era digital ini, penting bagi instansi pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi pekerjaan administrasi. Beberapa perubahan yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur teknologi, pemutakhiran sistem database, percepatan proses komunikasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pembenahan administrasi KPU juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di bidang teknologi informasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain adalah pengembangan sistem informasi, penerapan e-government, digitalisasi proses kerja, dan pemanfaatan big data untuk mendukung pengambilan keputusan. (Wahyuni, 2023)

Kegiatan Pemilu banyak orang berpartisipasi dalam proses Indonesia yang kompleks, sehingga perlu adanya penyesuaian antara sistem birokrasi yang ada dengan perkembangan teknologi yang ada (Arifah, 2020). Dengan adanya transformasi digital ini, diharapkan KPU lebih mampu menghadapi perubahan dan juga diharapkan pemilu dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan dan efektif.

Keputusan untuk menerapkan E-Government adalah sebuah peluang unik untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh dan memikirkan kembali seluruh organisasi pemerintah dari perspektif birokrasi dan alur kerja. Untuk membuat pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, terbuka, dan berpusat pada warga negara, kemajuan ke arah E-Government harus dilakukan. Kita harus bekerjasama untuk mendukung kemajuan E-Government untuk meningkatkan pelayanan publik tanpa mengurangi privasi dan keamanan. (Ronchi, 2019).

Dalam era digital pada saat ini juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi publik, terlebih dalam proses pemilihan. Dengan memanfaatkan platform - platform digital, seperti Instagram, twitter, Youtube, TikTok, dan lain sebagainya untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama gen Z yang sering menggunakan

platform digital tersebut. Salah satu Instansi pemerintahan yang telah menerapkan e-government dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

Adanya Website KPU Kabupaten Bogor itu sendiri membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Bukan hanya website KPU Kabupaten Bogor saja tetapi website SIPOL dan juga SIAKBA menjadi salah satu aplikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. (Buku Potret pemilu tahun 2019 Kabupaten Bogor)

Di dalam Website KPU terdapat dashboard KPU Better. Dashboard KPU Better ini menyediakan games yang berkaitan dengan Pemilu, adanya games yang telah disediakan menjadi salah satu bentuk sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bukan hanya game tetapi menu lain yang bisa diakses. Seperti untuk melihat beberapa pengumuman, dll. Selain itu dengan adanya inovasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk pemilih, menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sehingga para pemilih terlebih lagi pemilih pemula lebih tertarik dengan isu-isu pemilihan umum, yang dimana hal ini akan berpengaruh positif untuk kedepannya karena bisa menurunkan jumlah terjadinya golput.

Masifnya sosialisasi soal pemilu di sekolah-sekolah, membuat para remaja ini melengkapi data kependudukannya agar memiliki hak pilih. Adapun beberapa aplikasi yang disediakan KPU untuk meningkatkan partisipasi sebagai berikut:

Adanya Website KPU Kabupaten Bogor itu sendiri membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Bukan hanya website KPU Kabupaten Bogor saja tetapi website SIPOL dan juga SIAKBA menjadi salah satu aplikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. (Buku Potret pemilu tahun 2019 Kabupaten Bogor)

| Aplikasi | Penjelasan Aplikasi | Pihak Yang Menggunakan Aplikasi |
|--|--|---------------------------------|
| SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) | Aplikasi yang membantu mengidentifikasi partai politik dan anggotanya tersebar di seluruh Indonesia, meliputi pendaftaran partai politik, penetapan status pengamatan administratif, keanggotaan keterwakilan perempuan, dan penelitian aktual kantor partai, serta cetak formulir dan template. | Partai Politik, KPU |
| SIKABA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc) | Aplikasi SIAKBA digunakan untuk memudahkan pengelolaan SDM penyelenggara pemilu serta sebagai bagian dari upaya KPU untuk mengembangkan proses rekrutmen yang modern, transparan dan akuntabel. | KPU dan Masyarakat |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Website KPU Kabupaten Bogor | Website yang disediakan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh KPU kabupaten Bogor. | KPU Kabupaten Bogor dan Masyarakat |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

Tabel 1.1 Platform yang Digunakan KPU Kab. Bogor

Sumber : Website KPU Kabupaten Bogor

Sedangkan aplikasi berbasis website SIPOL untuk pendaftaran partai politik untuk dengan adanya SIPOL ini bermanfaat bagi penyelenggara pemilu dan juga masyarakat. Bagi penyelenggara lebih mudah untuk melakukan verifikasi data data diri anggota partai politik. Dalam PKPU No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian, administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. (JDIH KPU RI, 2017).

Tentu saja dengan adanya penggunaan aplikasi SIPOL, SIAKBA, dan website KPU Kabupaten Bogoor ini menjadi salah satu langkah reformasi menuju digitalisasi yang dimana semua serba menggunakan internet dalam menjalankan tugas termasuk kedalam pelayanan kepada public. Adanya dengan menerapkan e-government ini menjadi salah satu untuk membantu pelayanan secara digital. Dalam menerapkan e-government ini tentu saja menuai banyak pro dan kontra baik dikalangan masyarakat, KPU itu sendiri bahkan sampai pihak partai politik. Untuk mempertimbangkan penerapan e-government di KPU menjelang Pemilu 2024, penting untuk menilai manfaat dan risikonya secara menyeluruh. Meskipun e-government menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

masalah seperti risiko keamanan siber, kesenjangan digital, dan biaya implementasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemilu yang adil dan kredibel, pendekatan penerapan harus dirancang dengan cermat dan melibatkan pemangku kepentingan.

Dengan adanya Studi kasus pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 menjadi relevan untuk diteliti karena akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia dan juga dalam memanfaatkan teknologi di era serba digital pada saat ini. Pemilu tersebut akan menjadi ajang pemilihan presiden dan anggota legislatif yang akan menentukan arah dan masa depan negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, dan adil menjadi salah satu prioritas utama bagi KPU. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bogor dalam menghadapi era digital pada pelaksanaan menjelang Pemilu 2024.

Pertama, adanya pengaruh teknologi digital dalam mempengaruhi cara pemilih mendapatkan informasi serta mengakses proses pemilu. Dalam era digital yang semakin canggih, pemilih bisa lebih mudah mengakses informasi mengenai kandidat dan partai politik. KPU perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Kedua, persoalan keamanan data dan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam era digital. Karena dengan menggunakan web sering terjadi kendala bug yang dimana hal tersebut bisa jadi server sedang ada perbaikan ataupun server sedang diretas. Maka dari itu kewananan data dan informasi ini menjadi salah satu bentuk kekhawatiran dalam menggunakan aplikasi.

Keberadaan data pemilih serta informasi mengenai pemilu yang sensitif harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. KPU Kabupaten Bogor perlu melakukan perubahan dalam sistem keamanan dan perlindungan data agar dapat menjaga integritas pemilihan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketiga, perubahan sistem pemilihan dan penghitungan suara juga perlu dipertimbangkan oleh KPU Kabupaten Bogor. Penerapan teknologi digital dalam sistem pemilu dapat mempermudah proses penghitungan suara, namun juga memerlukan

penyesuaian dalam hal infrastruktur dan keahlian pegawai KPU Kabupaten Bogor itu sendiri. KPU Kabupaten Bogor perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat bekerja dengan baik dan adil serta mempersiapkan kemungkinan adanya gangguan teknis yang mungkin terjadi. Dalam konteks tersebut, studi kasus tentang peran KPU Kabupaten Bogor dalam implementasi e-government, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bogor.

Penelitian ini mengkaji literatur penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang peneliti teliti. Penelitian atau karya tulis mengenai Peran KPU dalam mengimplementasikan e-government belum banyak ditemukan. Sehingga Penelitian ini merujuk literatur terdahulu sebagai berikut:

Penelitian pertama, yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka merupakan penelitian dari Muhammad Herowandi (2022) dengan judul “*e-governance dan pemberdayaan masyarakat*”. Penelitian ini membahas mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi pelayanan publik dan kebijakan di era digital. Dalam konteks e-governance, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan melalui kolaborasi dengan pemerintah. Contoh konkritnya adalah penggunaan aplikasi E-Health di beberapa kota yang memudahkan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan proses administrasi di rumah sakit atau puskesmas. Dalam penelitian ini juga membahas tentang konsep disruption yang tidak hanya terjadi dalam industri digital, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai bidang termasuk birokrasi pemerintahan. Teknologi dan big data memainkan peran penting dalam mengubah cara tradisional dalam berbagai aspek kehidupan.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang e-governance, inovasi proses, dan perubahan dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran terkait pengembangan sumber daya manusia dalam implementasi e-governance, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dapat meningkatkan pelatihan berbasis e-governance bagi perangkat desa dan kecamatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian kedua, penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat Thailand terkait dengan penggunaan e-government oleh Saowakhon Nookhao dan Suppaporn Kiattisin (2023), dengan judul *“Achieving a Successful E-government : Determinants of behavioral intention from Thai citizens perspective”*. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku warga negara dalam menggunakan layanan e-government meliputi kepuasan warga negara, kegunaan yang dirasakan, dan efikasi dari komputer. Selain itu, kepuasan warga negara dan niat perilaku dipengaruhi oleh kualitas informasi, sistem, dan layanan. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah adalah faktor utama yang memengaruhi niat perilaku warga negara saat menggunakan layanan e-government. Namun, pengaruh sosial dan kondisi fasilitasi tidak memengaruhi niat perilaku warga negara saat menggunakan layanan e-government. Selain itu penelitian ini membahas implikasi teoritis dan praktis untuk pengembangan dan promosi layanan e-government, serta menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan dalam layanan e-government. Kelebihan dari penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan keberhasilan layanan e-government, serta menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pusat layanan umum di Thailand.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian oleh Sukarti Arista Rosita (2014), dengan judul *“Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi dan E-governance”*. Penelitian ini membahas mengenai tentang pentingnya penerapan e-government dan reformasi birokrasi yang membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Disebutkan bahwa e-government adalah perlu untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, e-governance memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat, meningkatkan transparansi, dan efisiensi dalam proses pelayanan publik. Kedua upaya ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan publik di Indonesia dengan memperhatikan partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kualitas organisasi pelayanan, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan etis. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government termasuk masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Dari segi

masyarakatnya pun dalam penerapan e-governance ini diperlukan kesadaran dan Partisipasi.

Selain itu, terdapat masalah dalam pelayanan publik di Indonesia seperti tidak adanya standar minimum kualitas pelayanan yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan daerah cenderung rule-driven dan kurang responsif terhadap opini publik, sehingga diperlukan birokrat yang inovatif dan responsif. Reformasi birokrasi dan penerapan e-government diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan publik dengan memperluas akses masyarakat, membangun sistem one-stop service, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Diperlukan juga dukungan institusi masyarakat madani dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah seperti perubahan kultur birokrasi, peningkatan kualitas organisasi pelayanan, pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan etis, serta perbaikan infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan penerapan e-government diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan publik di Indonesia.

Penelitian keempat, adalah penelitian dari Nicu Garviluta, dkk (2022). Dengan judul *“The Official Website as an Essential E-Governance Tool: A Comparative Analysis of the Romanian Cities’ Websites in 2019 and 2022”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan elektronik di kota-kota di Rumania meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Terdapat peningkatan skor rata-rata secara keseluruhan, meskipun masih rendah jika dibandingkan dengan skor maksimum yang mungkin dicapai. Kemajuan terbesar terlihat dalam dimensi keamanan dan perlindungan data pribadi serta layanan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain terkait dengan peningkatan kinerja E-Governance, hubungan antara urbanisasi dan skor E-Governance, serta ketersediaan informasi mengenai pandemi COVID-19 dan vaksinasi di situs web kota-kota di Rumania.

Penelitian ini memberikan wawasan penting terkait dengan pengembangan E-Governance di Rumania dan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam kualitas situs web pemerintah kota. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, penelitian ini memberikan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui platform digital. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2022 terhadap situs web kota-kota di Rumania, terdapat peningkatan kualitas situs web pemerintah kota dari tahun 2019 hingga 2022. Meskipun peningkatan tersebut signifikan, masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Evaluasi dilakukan terhadap lima dimensi kualitas situs web, yaitu Privasi/Keamanan, Kegunaan, Konten, Layanan, dan Partisipasi Warga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor rata-rata secara keseluruhan, dengan peningkatan yang signifikan terutama dalam dimensi keamanan dan perlindungan data pribadi serta layanan. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih bersifat inkremental daripada transformasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam kualitas situs web pemerintah kota, proses pengembangan E-Governance di Rumania masih berlangsung secara bertahap.

Penelitian kelima, penelitian ini dari Djakit Prihartono dengan judul "*Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*". Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerapan e-governance di era revolusi industry ini sangat penting. Karena E-Governance diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan juga mengurangi praktek korupsi. Salah satu contoh bentuk implementasi e-governance dalam penelitian ini ialah melalui aplikasi SIGNAL yang diluncurkan oleh POLRI untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Namun dalam penerapan layanan public berbasis e-governance ini masih memiliki beberapa hambatan, diantaranya yaitu; keterbatasan teknologi dalam aplikasi seperti SIGNAL yang baru seumur jagung, serta tantangan dalam pengimplementasikan system pajak 5 tahunan dan proses pergantian plat nomor kendaraan. Perlu ditekankan bahwa dalam pengimplemtasian pelayanan publik berbasis e-governance ini perlu diberi dukungan, kapasitas, dan nilai sebagai bentuk

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

elemen krusial dalam mewujudkan e-government dalam pelayanan publik. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek – aspek tersebut untuk memastikan manfaat dari e-governance ini bagi masyarakat luas.

Adanya kesamaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti lakukan adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan publik berbasis e-governance untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga faktor – faktor yang meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Penelitian keenam, menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan e-government di Indonesia. Penelitian oleh Junior Hendri Wijaya, dkk (2022). Dengan judul “E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020”. Menjelaskan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengembangan dan konsultasi kebijakan dapat menunjukkan partisipasi penuh masyarakat dalam implementasi E-Government, pengenalan e-partisipasi, yang diikuti dengan upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, dapat menghasilkan partisipasi masyarakat secara penuh.

Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang e-government. Dalam penelitian ini juga sudah memberikan data - data penggunaan e-partisipasi di Indonesia dari 2003 hingga 2020. Dalam data tersebut menyebutkan bahwa kondisi e-partisipasi di Indonesia masih mengalami naik turun dan belum stabil, namun disisi lain Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup besar dalam e-partisipasi.

Penelitian ketujuh, Skripsi dari Vina Nurul Afriani, (2022) dengan judul “*efektivitas implementasi e-government terhadap pelayanan di mal pelayanan publik Bogor*”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masih kurangnya kesiapan masyarakat untuk beralih ke pemerintahan digital, khususnya pada pelayanan

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

publik dan juga masih kurangnya komunikasi dua arah kepada pemerintah. Tetapi dengan adanya tuntutan dari pemerintah dan juga kemajuan teknologi pada saat ini, masyarakat harus beradaptasi dengan adanya perubahan pelayanan publik melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan dari efektivitas penyelenggaraan e-government dengan cara melihat pencapaian dari prinsip - prinsip e-government seperti transparansi, efisiensi, partisipasi, dan responsif. Penelitian ini bukan hanya melihat dari tingkat efektivitas melainkan juga melihat faktor pendorong dan penghambat penerapan e-government di MPP Kota Bogor. Adanya kesamaan penelitian ini dengan peneliti lakukan yaitu, mengidentifikasi terkait faktor pendorong dan juga penghambat penerapan e-government dalam meningkatkan partisipasi publik melalui e-government pada hasil penelitian.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ovelio Layuk (2019), dengan judul *“Analisis Aplikasi SIPOL Dalam Verifikasi Partai Politik Pada Pemilu 2019”*. Penelitian ini membahas dinamika politik yang terjadi dalam penerapan SIPOL dan dampaknya pada partai politik dan KPU. Beberapa isu yang dibahas antara lain adalah pro dan kontra dalam penerapan SIPOL, reaksi partai politik terhadap penerapan SIPOL, dan data palsu dan manipulatif yang ditemukan dalam proses verifikasi. Analisis ini memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana penerapan SIPOL mempengaruhi proses verifikasi partai politik pada Pemilu 2019. Adanya kesamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu membahas terkait penggunaan aplikasi SIPOL dalam tahapan Pemilu dalam mewujudkan e-demokrasi dan juga menciptakan Pemilu yang transparatif dan juga untuk meningkatkan partisipasi publik.

Penelitian kesembilan, penelitian oleh Anak Agung Istri Rishkanna Indira Nakula, dkk. (2023). Dengan Judul *“Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 “Studi Kasus Di Kabupaten Badung”*. Menurut penelitian ini, calon PPK harus mengklarifikasi bahwa mereka belum pernah menjadi anggota partai politik selama lima tahun dan bahwa penelitian administrasi yang dilakukan melalui SIPOL dan proses pendaftaran badan penyelenggara di tingkat PPK sudah sesuai dengan tahapan. Menurut penelitian

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

yang berbeda, operator SIPOL partai politik di pusat tidak dapat menentukan apakah data anggota partai sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan. Selain itu, sejumlah besar anggota partai politik dalam sampel tidak mengidentifikasi diri atau mendukung partai politik mereka karena mereka tidak percaya bahwa mereka adalah anggota partai sampai verifikasi faktual selesai dilakukan oleh KPU.

Penelitian kesepuluh, penelitian dari Sri Wahyuni (2023). Dengan judul *“The Role of E-government Based Good Governance And Bureaucratic Reform In The Context Of Improving The Performance Of Government Work units”*. Penelitian ini menyelidiki bagaimana tata kelola pemerintahan berbasis e-government dan reformasi birokrasi berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kinerja unit kerja pemerintah. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini melalui survei yang dilakukan menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) Partial Least Square (PLS) yang dilakukan dengan software SmartPLS 3.0. 431 pegawai pemerintah yang dipilih secara acak diikutsertakan dalam penelitian ini, dengan skala penilaian Likert dari 1 hingga 5.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government, reformasi birokrasi, pemerintahan yang baik, dan kinerja berkorelasi positif dan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-Government mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan good governance dalam meningkatkan kinerja satuan kerja pemerintah. Penerapan e-Government meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja satuan kerja pemerintah. E-Government meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang merupakan elemen kunci dari tata kelola yang baik. Penelitian ini berguna sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan e-government dan reformasi birokrasi yang efektif dalam tata kelola pemerintahan. Adapun kelemahan dari penelitian ini yaitu masih adanya keterbatasan yaitu adanya keterbatasan data sekunder dan juga ruang lingkup yang terbatas.

Penelitian ini berfokus mengkaji bagaimana KPU Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan e-government dalam mewujudkan e-governance di KPU

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Kabupaten Bogor. Dengan adanya penelitian ini guna untuk melihat sejauh mana KPU Kabupaten Bogor dalam mengimplementasi e-government menjelang Pemilu tahun 2024. Dalam menghadapi era digital telah diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan teknologi di dalamnya. Sehingga diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi kepada KPU menghadapi perubahan besar yang dibawa oleh era digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penerapan e-government di KPU Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan proses pemilu tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah:

1.1.1 Tujuan Praktis

- a. Menganalisis dampak e-government dan e-governance dalam meningkatkan transparansi di KPU Kabupaten Bogor.
- b. Menganalisis peran KPU Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan e-government dan e-governance.
- c. Menganalisis kendala dan tantangan dalam implementasi e-government dan e-governance di KPU Kabupaten Bogor
- d. Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi e-governance melalui pelayanan berbagai aplikasi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas e-government di Kabupaten Bogor.

1.1.2 Tujuan Teoritis

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan penelitian terkait dengan peran KPU Kabupaten Bogor serta kendala dan tantangan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan e-government untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting untuk KPU dan juga pembaca dalam memahami dan menganalisis peran KPU Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan e-government dalam menghadapi era digital pada pelaksanaan menjelang Pemilu di tahun 2024, khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik melalui platform digital. Dengan melalui penelitian ini, dapat ditemukan solusi-solusi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses administratif dan operasional KPU Kabupaten Bogor. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sehingga birokrasi menjadi lebih efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan pembatasan penelitian, serta pertanyaan dan manfaat penelitian dibahas secara menyeluruh dalam pendahuluan ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori dan konsep yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah pemecahan masalah yang akan dibahas di bab berikutnya dimasukkan ke dalam bab ini. Selain itu, bab ini juga menyediakan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Nabilah Nurhayani, 2024

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT OLEH KPU KABUPATEN BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam proses penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Dalam bab ini membahas tentang pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan teori dan metode yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dari penelitian dan juga saran untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.